

RENCANA KERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



BerAKHLAK  **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

BAB I.	Pendahuluan;
BAB II.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III.	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan;
BAB V.	Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



NO PARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah selesai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026, maka disusunlah RANHIR RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan berdasarkan Ranhir RKPD tahun 2025.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas RANHIR RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2025.

Samarinda, Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	62
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	75
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	106
2.5 Masyarakat	144
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	146
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	146
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	151
3.3 Program dan Kegiatan	154
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	161
BAB V PENUTUP	278
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	278
5.2 Rencana Tindak Lanjut	279

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Ponapean Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur S/D Tahun 2024.	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	62
Tabel 2.3 Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur.	64
Tabel 2.4 Hasil Penilaian SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.	69
Tabel 2.5 Penyampaian Data SKM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.	72
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur.	108
Tabel 2.7 Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	144
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah.	152
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur.	162

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Grafik Realisasi Capaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023	66
Gambar 2.2 Grafik Realisasi Capaian Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	72
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	105
Gambar 3.1.1 Kerangka Pikir RPJPN	146

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2/0255/B. Adpim-I, Tentang Pembentukan Tim Pembahas Dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.
- Lampiran 2 Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2/0243/B. Adpim-I, Tentang Panitia Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan landasan hukum di bidang perencanaan dan pembangunan yang mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun RENJA Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan RENJA Perangkat Daerah, yang saat ini Ranhir RENJA 2025, disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur tahun 2025, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada RPJMD. Lebih luas lagi diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran bagaimana mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada perubahan Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi RENJA Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi RENJA tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, juga akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di lingkungan Biro-Biro untuk tahun 2025 sesuai prioritas Pembangunan Kalimantan Timur, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan kebijakan dan program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Tahapan ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun RENJA Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. melaksanakan orientasi mengenai RENJA untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian RENJA Sekretariat Daerah tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RENJA Sekretariat Daerah setelah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, yang mengacu pada rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir RENJA Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil Evaluasi RENJA Tahun Lalu
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan berpedoman pada tahapan dimaksud, maka diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi komitmen

bersama guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, serta menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Februari 2024 Nomor : 000.7.2/542/Bapp-II/2024 perihal : Entry

Rancangan Akhir RKPD/RENJA PD Tahun 2025 pada Aplikasi SIPD-RI.

1.3 Maksud dan Tujuan

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman dalam menentukan arah dan penetapan program dan kegiatan tahun 2025;
2. Pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Program 2024 dengan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, dan pagu anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk penambahan kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan tersusunnya RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2025 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan

penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RENJA Sekretariat Daerah, proses penyusunan RENJA Sekretariat dan keterkaitan antara RENJA Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Sekretariat Daerah serta susunan garis besar dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melakukan *review* hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah tahun yang lalu, dan/atau realisasi APBD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, meliputi tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi misi, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antar rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025

Berisi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kaitannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Berisi rencana kerja dan pendanaan biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2025.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Sekretariat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun, dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi yang dijabarkan dalam Bab Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu, dimaksudkan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam RENJA tahun lalu.

Evaluasi yang dimaksud untuk mengetahui:

1. Target kinerja yang tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar lebih memudahkan dalam memahaminya evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, dituangkan ke Tabel 2.1 yang berisi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan
Pencapaian RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur s.d Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		99,7 %	84 %	84 %	100,00%			
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87					85	85	97,70%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	98,22 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	98 %	100 %	100 %	100,00%	95 %	95 %	100,00%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	6 Orang	7 Orang	7 Orang	100,00%	7 Orang	7 Orang	100,00%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1 Paket	1 Paket	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	90 OT	90 Laporan	90 Laporan	100,00%	100 Laporan	100 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00%	29 Unit	29 Unit	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	350 Lembar	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	442 Lembar	442 Lembar	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	7 Unit	7 Unit	100,00%	9 Unit	9 Unit	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	12 Laporan	12 Unit	12 Unit	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %					100 %	100 %	100,00%
		Persentase Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah		87 %	90 %	90 %	100,00%			0,00%
		2. Persentase LPPD yang di laporkan	100 %					100 %	100 %	100,00%
		Persentase Pengendalian Penerapan SPM		100 %						
		3. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %					100 %	100 %	100,00%
		Persentase terlaksananya koordinasi dalam bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		90 %	90 %	90 %	100,00%			
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	100 %	90 %	90 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	100 %	90 %	90 %	100,00%	95 %	100 %	105,26%
					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
					Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	30 Dokumen	30 Dokumen	100,00%
					Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
BIRO HUKUM														
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	89 %					87 %	87 %	97,75%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	75 %	75,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	75,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100,00%	100 Orang	100 Orang	100,00%
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	-	2 Orang	2 Orang	100,00%	2 Orang	2 Orang	16,67%
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	20 Paket	20 Paket	40,00%
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	15 Paket	15 Paket	125,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	40 OT	51 Laporan	51 Laporan	100,00%	40 Laporan	40 Laporan	80,00%
4	01	01	1.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	01	1.08	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Laporan	10 Unit	10 Unit	100,00%	5 Unit	5 Unit	500,00%
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Palaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	2,40%
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	12 Bulan	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	12 Bulan	30 Unit	30 Unit	100,00%	30 Unit	30 Unit	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	96,85 %	100 %	129,37 %	129,37%	100 %	100 %	100,00%
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	95,22 %	100 %	154 %	154,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80 Dokumen	53 Dokumen	90 Dokumen	86 Dokumen	95,56%	10 Dokumen	10 Dokumen	12,50%
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	905 Dokumen	650 Dokumen	901 Dokumen	138,62%	750 Dokumen	750 Dokumen	100,00%
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	800 Dokumen	958 Dokumen	740 Dokumen	968 Dokumen	130,81%	700 Dokumen	700 Dokumen	87,50%
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	400 Dokumen	352 Dokumen	350 Dokumen	369 Dokumen	105,43%	350 Dokumen	350 Dokumen	87,50%
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	98,97 %	100 %	180 %	180,00%	100 %	100 %	100,00%
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Perkara	10 Dokumen	10 Perkara	12 Perkara	120,00%	10 Kasus	10 Kasus	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	2 Laporan	5 Kasus	12 Kasus	240,00%	25 Kasus	25 Kasus	500,00%
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat		75	84	83	98,81%			
						Indeks kualitas layanan kesekretariatan biro kesra	100				0,00%	100 %	100 %	100 %
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	94 %	90 %	90 %	90 %	100,00%	93,61 %	50 %	53,19%
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	90 %	84 %	84 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	2	4 orang	2 orang	50,00%	4 Orang	4 Orang	100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 paket				6 Paket	6 Paket	100,00%
		Jumlah laporan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 laporan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 paket	3 paket	3 paket	100,00%	12 Paket	12 Paket	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 unit	10 Unit	10 Unit	100,00%	8 Unit	8 Unit	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	20 unit	20 20 Unit	20 20 Unit	100,00%	18 Unit	18 Unit	100,00%
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100 %	90 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
		Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	100 unit	100 100	100 100	100,00%	200 Unit	200 Unit	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100,00%	10 Lembaga	10 Lembaga	100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	13 dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	12 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	20 dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%

BIRO PEREKONOMIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	82					81,00%	81,00%	100,00%
		Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Perekonomian		83 %	84	87	103,57%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan		100 %	8 dokumen	6 dokumen	75,00%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%		8 dokumen	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00%		6 laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	92 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	292 %	307,37%
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	18 Dokumen	150,00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan		100 %	100 %	100 %	100,00%		200 %	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%		2 laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	40 %	40,00%	100 %	240 %	240,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	23 Dokumen	95,83%	25 Dokumen	72 Dokumen	288,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	14 orang	3 orang	1 orang	33,33%	3 orang	18 orang	600,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 paket				0,00%	41 paket	41 Paket	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	300 %	333,33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	10 paket	50 paket	50 paket	100,00%	50 paket	110 paket	220,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	600 Paket	25 paket	2 paket	92,00%	25 paket	648 paket	2592,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	12 Paket	12 laporan	2 laporan	16,67%	2 paket	16 laporan	800,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	12 Dokumen	96 Laporan	96 Laporan	100,00%	96 dokumen	204 Laporan	212,50%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	130 Laporan	120 Laporan	125 OT	125 OT	100,00%	130 laporan	375 OT	288,46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	300 %	300,00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket				0,00%	5 paket	5 paket	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Unit	1 Unit	4 unit	4 unit	100,00%	14 unit	19 unit	135,71%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	300 %	300,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	300,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12 dokumen	36 dokumen	300,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	98 %	98,00%	100 %	298 %	298,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	2 unit	4 unit	200,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	12 unit	25 unit	24 unit	96,00%	25 unit	61 unit	244,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit			0,00%	1 unit	1 unit	100,00%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	95 %	100 %	1 %	100,00%	100 %	295 %	295,00%
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	95 %				0,00%	90 %	90 %	94,74%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	6 laporan	6 laporan	100,00%	1 laporan	8 laporan	800,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen	3 laporan	3 laporan	100,00%	2 Dokumen	7 laporan	350,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	1 Dokumen	3 laporan	3 laporan	100,00%	2 Dokumen	6 laporan	300,00%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	7 laporan	7 laporan	100,00%	1 laporan	9 laporan	900,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	3 Dokumen	5 laporan	5 laporan	100,00%	6 Dokumen	14 laporan	233,33%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	2 laporan	2 laporan	100,00%	2 Dokumen	6 laporan	300,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	2 laporan	2 laporan	100,00%	2 Dokumen	6 laporan	300,00%
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	300,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1 Dokumen	10 laporan	10 laporan	100,00%	10 Dokumen	21 laporan	210,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Dokumen	3 laporan	300,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Dokumen	3 laporan	300,00%
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	84,03 %	84 %	85,86 %	102,21%		169,89 %	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	83 Indeks				-	85 Indeks	85 Indeks	102,41%
01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)		1 Dokumen				-		1 Dokumen	-
					Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		1 Dokumen	-	
					Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			-	100	100 %	100,00%		
	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	0	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	12 Laporan	-
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%
01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	1 Dokumen	-	
					Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %	200 %	200,00%	
	01	01	1.05	02		Tersedianya pakaian pegawai		33 Stel			-		33 Stel	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel		53 Stel	53 Stel	100,00%	50 Stel	103 Stel	206,00%
	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	0 Laporan	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	10 Laporan	-
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		25 Orang	22 Orang	88,00%	10 Orang	32 Orang	213,33%
	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	0 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	12 Laporan	-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	100,00%	10 Orang	20 Orang	133,33%
	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	0	3	0	0	-	0	3	-
						Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	82		100	100	100,00%	80	180	219,51%
	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	0 Unit	32 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	32 Unit	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	0 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	10 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		10 Paket	10 Paket	100,00%	1 Paket	11 Paket	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	1 Laporan	100,00%
01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	0 Laporan	15 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	100,00%
01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	92		85	100	117,65%
								90	190	206,52%
01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		84 Unit	84 Unit	100,00%
								10 Unit	94 Unit	940,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	3 Dokumen	0	0	-
					Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85		85	100	117,65%
								85	185	217,65%
01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	0 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%
								1 Laporan	13 Laporan	1300,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	-	0 Bulan	12 Bulan	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%	1 Laporan	13 Laporan	1300,00%
	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	25 Laporam	0 Laporam	0 Laporam	-	0 Laporam	25 Laporam	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporam	12 Laporam	12 Laporam	100,00%	1 Laporam	13 Laporam	1300,00%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	0 unit	30 unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	30 unit	-
						Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %		85 %	100 %	117,65%	85 %	185 %	217,65%
	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	1 Unit	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		1 Unit	1 Unit	100,00%	2 Unit	3 Unit	150,00%
	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	3 Unit	-
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	4 Unit	133,33%	2 Unit	6 Unit	200,00%
	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	0 Unit	30 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	30 Unit	-
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	30 Unit	150,00%	20 Unit	50 Unit	250,00%
	01	8			PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85 %				-	0 %	0 %	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan		100 %	100 %	100 %	100,00%	0 %	101 %	-
		Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan		85,37 %	80 %	90 %	112,50%	0 %	175,37 %	-
		Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen			-		3 Dokumen	-
		Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %		80 %	83,3 %	104,13%	80 %	163,3 %	192,12%
		Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	85 %				-		0 %	0,00%
01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	6 Dokumen	-	0	6 Dokumen	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50,00%	6 Laporan	12 Laporan	300,00%
	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		12 Laporan			-	5 Laporan	17 Laporan	-
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%	6 Laporan	18 Laporan	450,00%
	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III	6 Laporan	6	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	6 Laporan	18 Laporan	300,00%
		08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen			-		3 Dokumen	-
						Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	85 %		80 %	100 %	125,00%	80 %	180 %	211,76%
	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan		4 Laporan			-		4 Laporan	-
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah		12 Laporan			-	1 Laporan	13 Laporan	-
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	200,00%
	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan		1 Laporan			-	1 Laporan	2 Laporan	-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA														
	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100,00%	Level 3	Level 3	100,00%
						Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	35 %	-	-	-	-	30 %	- %	-
	01	07	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4	-	-	-	-	4	4	100,00%
						Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	-	100	0,9	0,9	100,00%	-	-	-
	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%
	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%
	01	07	1.02		Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel		-	-	-	1	1	100,00%
						Persentase layanan pengadaan secara elektronik	-	100	0,95	0,95	100,00%	-	-	-
	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%
	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%
	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%
	01	07	1.03		Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel				0,00%	4 Variabel	4 Variabel	100,00%
						Persentase pembinaan barang dan jasa	-	100%	87,50%	87,50%	100,00%	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100,00%	250 Orang	250 Orang	100,00%
	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78 Indeks					71	90	100,00%
						Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	83 %	84 %	84 %	100,00%	-	-	-
	01	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	88 %	-	-	-	-	85 %	92 %	100,00%
						Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	-	90	90	90	100,00%	-	-	-
	01	01	1.02	0002	Penyediaan admnisitrasi pelaksanan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
	01	01	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	60 orang	-	-	-	-	50	50	100,00%
						Meningkatnya kapasitas pegawai	-	100 %	80 %	80 %	100,00%	-	-	-
	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	1 Paket	100,00%
	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100,00%	10 Orang	10 Orang	100,00%
	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20 orang	12 orang	11 orang	11 orang	100,00%	20 orang	20 orang	100,00%
	01	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	83 %	-	-	-	-	80	80	100,00%
						Meningkatnya pelayanan administrasi umum	-	100 %	90 %	90 %	100,00%	-	-	-
	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	3 Paket	3 Paket	100,00%
	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	12 Paket	12 Paket	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	01	01	1.06	0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100,00%	40 laporan	40 laporan	100,00%
	01	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	88 %	-	-	-	-	85	85	100,00%
						Meningkatnya pelayanan kantor	-	100 %	85 %	85 %	100,00%		-	-
	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 unit	1	126	126	100,00%	40	40	0,00%
	01	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	83 %	-	-	-	-	80	80	100,00%
						Meningkatnya pelayanan administrasi umum	-	100 %	85 %	85 %	100,00%		-	-
	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00%	12 laporan	12 laporan	100,00%
	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 laporan	100,00%
	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 laporan	100,00%
	01	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 %	-	-	-	-	80	80	100,00%
						Persentase BMD dalam kondisi baik	-	100 %	85 %	85 %	100,00%	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%
	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	2 unit	2 unit	100,00%
	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	50 unit	22 unit	22 unit	100,00%	40 unit	40 unit	100,00%
BIRO ORGANISASI														
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Organisasi		83 %	84 %	0	-			
						Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	84 Indeks	0 Indeks	84 Indeks	89,88 Indeks	107,00%	82 Indeks	171,88	204,62%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	0	92 %	0	0	-	0	92 %	-
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	0	0	1	1	100,00%	0	1	-
						Persentase realisasi anggaran	100 %	0 %	0	0	-	100 %	100	100,00%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Administrasi Keuangan	0	12 Dokumen	0	0	-	0	12 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	13	108,33%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	0	100 %	0	0	-	0	100 %	-
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara	100 %	0 %	100 %	100 %	100,00%	0	100 %	100,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD	0	1 Laporan	0	0	-	0	1 Laporan	-
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	12 Laporan	13 Laporan	108,33%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	7 Orang	1 Orang	14,29%	0	1 Orang	-
		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	0 %	0	0	-	100	100	100,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2 Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2 Paket	4 Paket	200,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3 Orang	0 Orang	9	1 Orang	11,11%	3 Orang	4 Orang	133,33%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi		95 %	0	0	-	0	95 %	-
		Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Biro Organisasi	%	0 %	100 %	100 %	100,00%	0	100	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	35	0	0	-	0	35	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	0 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00%	3	6	200,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	0	1200	0	0	-	0	1200	-
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2	4 Paket	200,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2	12 Unit	0	0	-	2 Unit	14 Unit	700,00%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	2	4 Paket	200,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	0	60 Orang	0	0	-	0	60 Orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1	2 Laporan	200,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	0	162	0	0	-	0	162	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1	2 Laporan	200,00%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2	4 Dokumen	200,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100	0	0	-	0	100	-
		Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Organisasi)	0	0	100 %	100 %	100,00%	0	100 %	-
		Persentase pemenuhan BMD	100 %	0 %	0	0	-	100	100	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	10 Unit	15 Unit	15 Unit	100,00%	15	40 Unit	266,67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	75	0	0	-	0	75	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	0	12 Laporan	-
		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	0 %	0	0	-	100	100	100,00%
		Laporan Surat Masuk dan Keluar	0	0	0	0	-	0	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	200,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1 Laporan	0	0	-	0	1 Laporan	-
		Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	0	12 Dokumen	0	0	-	0	12 Dokumen	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	12 Laporan	13 Laporan	108,33%
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	0	100 %	0	0	-	0	100 %	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	100 Unit	50 Unit	50,00%	0	50 Unit	-
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	0 %	0	0	-	100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	0	12 Unit	0	0	-	0	12 Unit	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	0 Unit	18 Unit	13 Unit	72,22%	9	22 Unit	122,22%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	0	20 Unit	0	0	-	0	20 Unit	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	0 Unit	21 Unit	6 Unit	28,57%	12 Unit	18 Unit	85,71%
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)		91,89	97 %	100 %	103,09%			
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (Baik)		77,89	81 %	97,3 %	120,12%			
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			89 %	100 %	112,36%			
		Indeks Kelembagaan	73 Indeks					72 Indeks	72 Indeks	98,63%
		Indeks Kematangan Organisasi	45 Indeks					44 Indeks	44 Indeks	97,78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD					1 PD	1 PD	100,00%
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	60 %					40 %	40 %	66,67%
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	87 %					86 %	86 %	98,85%
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi		42					42 Indeks	
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Kelembagaan Organisasinya sesuai ketentuan			100 %	100 %	100,00%		100 %	
		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)			96 %	100 %	104,17%		100 %	
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %					100 %	100 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100 %					100 %	100 %	100,00%
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Kelembagaannya	0	37	0	0	-	0	37	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Hasil Evaluasi Kematangan Organisasi	0	37	0	0	-	0	37	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	3 Dokumen	150,00%
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelembagaannya	0	10	0	0	-	0	10	-
		Persentase Usulan Fasilitasi Kelembagaan Kab / Kota yang ditindaklanjuti	0	50	0	0	-	0	50	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	0	37	0	0	-	0	37	-
		Laporan Evaluasi Jabatan	0	1	0	0	-	0	1	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	0	1	0	0	-	0	1	-
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Anjab dan ABK nya	0	10	0	0	-	0	10	-
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Pelaksanaan Standar Kompetensi	0	10	0	0	-	0	10	-
		Jumlah Pembinaan Kab/Kota terhadap Penyusunan Formasi Pegawai	0	10	0	0	-	0	10	-
		Persentase Usulan Anjab dan ABK Kab Kota yang dilakukan Validasi	0	50	0	0	-	0	50	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	3 Dokumen	150,00%
		Rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	78,1	0	0	-	0	78,1	-
		Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan sesuai aturan / Ketentuan	0	0	100	100	100,00%	0	100	-
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 %	0 %	0	0	-	90 %	90 %	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100 %	0 %	0	0	-	100 %	100 %	100,00%
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023	0	1	0	0	-	0	1	-
		Laporan Fasilitas Evaluasi Reformasi Birokrasi	0	1	0	0	-	0	1	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	0	1	0	0	-	0	1	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan LKJIP	0	1	0	0	-	0	1	-
		Jumlah PD yang difasilitasi Evaluasi AKIP	0	1	0	0	-	0	1	-
		Jumlah PD yang difasilitasi Penerapan / Penguatan SAKIP	0	1	0	0	-	0	1	-
		Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	0	1	0	0	-	0	1	-
		Jumlah Kab / Kota yg dilakukan Monitoring dan Pembinaan SAKIP	0	10	0	0	-	0	10	-
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan penerapan Budaya Kerja	0	37	0	0	-	0	37	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang membentuk Kelompok Budaya Kerja	0	37	0	0	-	0	37	-
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	200,00%
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Laporan Fasilitas Evaluasi SOP Perangkat Daerah	0	1	0	0	-	0	1	-
		Dokumen peta Proses Bisnis	0	1	0	0	-	0	1	-
		Laporan Fasilitas Tata Naskah Dinas	0	1	0	0	-	0	1	-
		Laporan Fasilitas Pakaian Dinas	0	1	0	0	-	0	1	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi dan Evaluasi standar pelayanan terhadap Perangkat Daerah	0	1	0	0	-	0	1	-
		Fasilitasi dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0	1	0	0	-	0	1	-
		Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	0	1	0	0	-	0	1	-
		Fasilitasi Evaluasi Unit Pelayanan Publik	0	1	0	0	-	0	1	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Laporan Binwas dan Monitoring terhadap Kab/Kota penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	1	0	0	-	0	1	-
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%
BIRO UMUM														
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5	-	-	81,44	-	84	84	100,00%
						Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85 %	-	-	-	-	80 %	80 %	100,00%
4	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	380 Orang/ Bulan	14 Dokumen	373 Orang/ Bulan	373 Orang/ Bulan	100,00%	383 Orang/ Bulan	383 Orang/ Bulan	100,00%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
4	01	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
4	01	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	358 Stel	3 Paket	3 Paket	100,00%	3 Paket	3 Paket	100,00%
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	135 Orang	3 Laporan	125 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	100,00%	175 Orang	175 Orang	100,00%
4	01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	15 Jenis	6 Paket	6 Paket	100,00%	5 Paket	5 Paket	100,00%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	12 Laporan	6 Paket	6 Paket	100,00%	6 Paket	6 Paket	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	225 Paket	12 Laporan	225 Paket	225 Paket	100,00%	225 Paket	225 Paket	100,00%
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Paket	5 Jenis	14 Paket	14 Paket	100,00%	14 Paket	14 Paket	100,00%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	-	-	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1800 Laporan	12 Laporan	1920 Orang/ Perjalanan	1920 Orang/ Perjalanan	100,00%	2240 Laporan	2240 Laporan	100,00%
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3 Aplikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
4	01	01	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	15 Unit	25 Unit	111 nit	111 nit	100,00%	5 Unit	5 Unit	100,00%
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	-	-	-	100,00%	6 Unit	6 Unit	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 Unit	10 Jenis	150 unit	150 unit	100,00%	533 Unit	533 Unit	100,00%
4	01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2100 Lembar	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
4	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	211 Unit	150 Unit	80 Unit	80 Unit	100,00%	273 Unit	273 Unit	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit	-	447 Unit	447 Unit	100,00%	1298 Unit	1298 Unit	100,00%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00%	13 Unit	13 Unit	100,00%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	325 Unit	150 Unit	325 Unit	325 Unit	100,00%	505 Unit	505 Unit	100,00%
4	01	01	11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang/ Bulan	2 Laporan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100,00%	1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	100,00%
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	8 Paket	-	8 Paket	8 Paket	100,00%	8 Paket	8 Paket	100,00%
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	-	8 Orang	8 Orang	100,00%	4 Orang	4 Orang	100,00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	-	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100,00%	1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	100,00%
4	01	01	12			Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	1 Laporan	17 Paket	17 Paket	100,00%	18 Paket	18 Paket	100,00%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	1 Laporan	17 Paket	17 Paket	100,00%	15 Paket	15 Paket	100,00%
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	1 Laporan	28 Paket	28 Paket	100,00%	17 Paket	17 Paket	100,00%
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN															
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan		83	84	84	100,00%			0,00%
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 Indeks				0,00%	100 Indeks	100	100,00%
							Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %				0,00%	100 %	100	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Indeks				0,00%	100 Indeks	100	100,00%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	100	100	100	100,00%	100	25	27,78%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9 Dokumen	450,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	22,22%
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	100	100	100	100,00%	100	25	27,78%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	5 Dokumen	41,67%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	100	100	100	100,00%	100	25	27,78%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	100	100	100	100,00%	100	100	111,11%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan peralatan Alat tulis kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	5 Laporan	41,67%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	15 Laporan	6 Laporan	50,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	160 Laporan	160 Laporan	160 Laporan	160 Laporan	100,00%	160 Laporan	70 Laporan	43,75%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang diadakan	1000 Porsi	1000 Porsi	1000 Porsi	627 Porsi	62,70%	1000 Porsi	450 Porsi	45,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	100	100	100	100,00%	100	100	111,11%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	5	5	5	100,00%	5	2	40,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	100	100	100	100,00%	100	100	111,11%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya (STNK) dan dipelihara	15	15	15	15	100,00%	15	6	40,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	5 Laporan	41,67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	100	100	100	100,00%	100	100	111,11%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	5 Dokumen	41,67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air yang terbayarkan	12	12	12	12	100,00%	12	5	41,67%
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen naskah pidato dan presentasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	5 Dokumen	41,67%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen yang terpublikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	5 Dokumen	41,67%
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumen penyediaan data yang terdokumentasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	5 Dokumen	41,67%
	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah dokumen koordinasi acara kegiatan Pemda	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen kunjungan tamu yang terlayani	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah dokumen administrasi keprotokolan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%

Sumber: Ranwal RKPD dan kompilasi data biro-biro di lingkup Setda Prov. Kaltim

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilihat berdasarkan sasaran/target RENSTRA periode sebelumnya, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah, dan dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kelembagaan			69,00	72,00	73,00	74,00	88,48	-	73,00	74,00	
2	Indeks Kematangan Organisasi			-	44,00	45,00	47,00	-	-	45,00	47,00	
3	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)			-	1,00	1,00	3,00	-	-	1,00	3,00	
4	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)			-	40,00	60,00	100,00	-	-	60,00	100,00	

5	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)			71,00	85,00	87,00	89,00	87,06	0	87	89	
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			-	4,25	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan			-	69,00	75,00	75,00	-	-	75,00	75,00	
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			-	2,20	2,50	2,70	-	-	2,50	2,70	

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dan data dari biro diolah

Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kelembagaan

Indeks Kelembagaan dari hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sesuai dengan PermenPANRB nomor 20 tahun 2018 adalah **88.48** (Peringkat 5), hasil ini dapat dilihat secara terperinci pada tabel sebagai berikut:

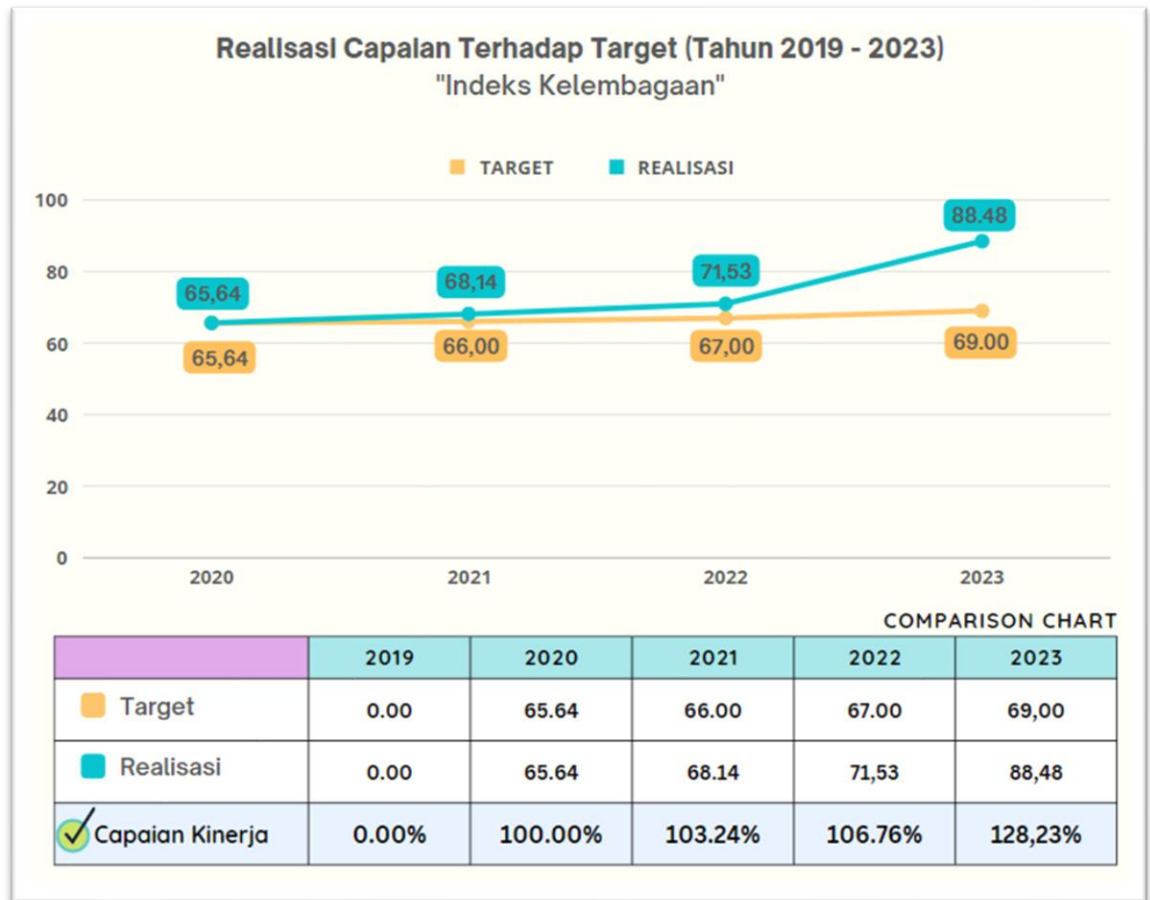
Tabel 2.3
Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan terhadap Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH NILAI DIMENSI STRUKTUR	JUMLAH NILAI DIMENSI PROSES	SKOR PENILAIAN	PERINGKAT KOMPOSIT
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50,000	48,929	98,929	PERINGKAT 5
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan <i>Ternadu Satu Pintu</i>	48,611	50,000	98,611	PERINGKAT 5
3	Badan Pendapatan Daerah	49,148	48,750	97,898	PERINGKAT 5
4	Dinas Pemerdayaan Masyarakat Dan <i>Pemerintahan Desa</i>	47,758	49,286	97,044	PERINGKAT 5
5	Dinas Perhubungan	47,222	48,601	95,823	PERINGKAT 5
6	RS Mata	46,032	49,500	95,532	PERINGKAT 5
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	45,489	49,500	94,989	PERINGKAT 5
8	Dinas Perkebunan	47,338	46,583	93,922	PERINGKAT 5
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44,981	47,250	92,231	PERINGKAT 5
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44,347	47,417	91,764	PERINGKAT 5
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44,024	47,119	91,143	PERINGKAT 5
12	Dinas Pemuda Dan Olahraga	42,076	49,000	91,076	PERINGKAT 5
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	44,463	46,098	90,561	PERINGKAT 5
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & <i>Perumahan Rakyat</i>	44,722	45,250	89,972	PERINGKAT 5
15	RSJD Atma Husada Mahakam	43,037	46,682	89,718	PERINGKAT 5
16	Sekretariat Daerah	44,247	44,766	89,013	PERINGKAT 5
17	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan <i>Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	47,420	41,202	88,622	PERINGKAT 5
18	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	41,182	46,643	87,824	PERINGKAT 5
19	Dinas Kehutanan	41,996	45,676	87,672	PERINGKAT 5
20	Inspektorat	39,978	47,500	87,478	PERINGKAT 5
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	43,321	43,607	86,928	PERINGKAT 5
22	Sekretariat DPRD	47,474	39,333	86,807	PERINGKAT 5
23	Badan Penghubung	44,474	42,113	86,588	PERINGKAT 5
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	44,276	42,265	86,541	PERINGKAT 5
25	Dinas Sosial	44,078	42,449	86,527	PERINGKAT 5
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	44,661	41,512	86,173	PERINGKAT 5
27	RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo	38,353	47,536	85,889	PERINGKAT 5
28	RSUD KORPRI	41,858	43,702	85,561	PERINGKAT 5
29	Dinas Kesehatan	42,182	42,994	85,176	PERINGKAT 5
30	Badan Kepegawaian Daerah	43,101	41,690	84,791	PERINGKAT 5
31	Dinas Pariwisata	44,724	39,241	83,965	PERINGKAT 5
32	RSUD A. W. Sjahranie	39,758	44,095	83,853	PERINGKAT 5
33	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	44,428	39,369	83,797	PERINGKAT 5
34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi <i>Dan UMKM</i>	38,173	45,473	83,647	PERINGKAT 5

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH NILAI DIMENSI STRUKTUR	JUMLAH NILAI DIMENSI PROSES	SKOR PENILAIAN	PERINGKAT KOMPOSIT
35	Dinas Lingkungan Hidup	39,411	44,095	83,506	PERINGKAT 5
36	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	40,855	41,009	81,864	PERINGKAT 5
37	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	40,185	40,940	81,126	PERINGKAT 5
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36,802	44,018	80,820	PERINGKAT 5
39	Satuan Polisi Pamong Praja	38,897	38,286	77,183	PERINGKAT 4
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		43,617	44,858	88,476	PERINGKAT 5

Capaian tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 yang realisasinya sebesar 71,53. Pencapaian ini naik 23,70% dari tahun 2022. Perkembangan trend Indeks Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2.1
Grafik Realisasi Capaian Indeks Kelembagaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023



Dalam pencapaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor – faktor yang mendorong tercapainya kinerja ini adalah sebagai berikut:

- i. Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah.
- ii. Pemahaman terhadap pernyataan setiap dimensi penilaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- iii. Kepatuhan dalam pemenuhan bukti dukung yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

b. Faktor Penghambat atau Permasalahan

Faktor – faktor yang menjadi penghambat atau permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

- i. Masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami Pernyataan / Pertanyaan yang ada pada evaluasi kelembagaan.
- ii. Kurangnya bukti dukung yang memperkuat jawaban dalam evaluasi kelembagaan.

c. Solusi atau upaya perbaikan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

- i. Melakukan sosialisasi tentang pemenuhan dimensi-dimensi yang menjadi variabel penilaian dalam Indeks Kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018.
- ii. Melakukan pendampingan dalam pengisian atau pemenuhan bukti dukung dalam menjawab evaluasi kelembagaan.

2. Indeks Kematangan Organisasi

Indikator Indeks Kematangan Organisasi baru ditargetkan pada RENSTRA 2024-2026. Adapun Realisasi Indeks Kematangan Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah 48,68 dengan Predikat / Kategori Sangat Tinggi.

Dalam pencapaian Indeks Kematangan Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor – faktor yang mendorong tercapainya kinerja ini adalah sebagai berikut:

- i. Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan evaluasi Kematangan Organisasi pada Perangkat Daerah.
- ii. Pemahaman terhadap pernyataan setiap Variabel penilaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- iii. Kepatuhan dalam pemenuhan bukti dukung setiap variabel yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

b. Faktor Penghambat atau Permasalahan

Faktor – faktor yang menjadi penghambat atau permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

- i. Masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami Variabel - variabel yang ada pada evaluasi kematangan organisasi.
- ii. Kurangnya bukti dukung yang memperkuat jawaban dalam Kematangan Organisasi.

c. Solusi atau upaya perbaikan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

- i. Melakukan sosialisasi tentang pemenuhan variabel penilaian dalam Indeks Kematangan Organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018.
- ii. Melakukan pendampingan dalam pengisian atau pemenuhan bukti dukung dalam menjawab evaluasi Kematangan Organisasi.

3. Jumlah Perangkat Daerah Kluster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)

Indikator Jumlah Perangkat Daerah Kluster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) baru ditargetkan pada RENSTRA 2024-2026.

Realisasi Jumlah Perangkat Daerah Kluster Utama yang mendapat Nilai AKIP Minimal A (Memuaskan) Tahun 2023 adalah 0 Perangkat Daerah dan di tahun 2024 ditargetkan 1 Perangkat Daerah kluster utama yang memperoleh Predikat A (Memuaskan), untuk tahun 2023 ada 2 Perangkat Daerah dari kluster tambahan yaitu Badan Kepegawaian Daerah dengan Nilai 81,80 dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie dengan Nilai 81,40 yang memperoleh Predikat SAKIP A (Memuaskan). Pencapaian ini baru ditahun 2023 ada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh Predikat PeNilaian A (Memuaskan). Berikut tabel yang menggambarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Hasil Penilaian SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

No.	Range Nilai	Predikat Kinerja		Jumlah Perangkat Daerah
1	nilai > 90 s/d 100	AA	Sangat Memuaskan	0
2	nilai > 80 s/d 90	A	Memuaskan	2
3	nilai > 70 s/d 80	BB	Sangat Baik	20
4	nilai > 60 s/d 70	B	Baik	14
5	nilai > 50 s/d 60	CC	Cukup	1
6	nilai > 30 s/d 50	C	Kurang	0
7	nilai > 0 s/d 30	D	Sangat Kurang	0

Dalam pencapaian Jumlah Perangkat Daerah Kluster Utama yang mendapat Nilai AKIP Minimal A (Memuaskan) dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat atau Permasalahan

Faktor – faktor yang menjadi penghambat atau permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

- i. Sebagian besar Perangkat Daerah belum maksimal dalam menyusun dokumen perencanaan, penerapan reward dan punishment, monitoring dan evaluasi rencana aksi, evaluasi capaian kinerja internal.
- ii. Penyusunan Logical Framework dalam membentuk pohon kinerja atau penjenjangan kinerja masih banyak yang belum membentuk hubungan kasualitas atau sebab akibat dari level atas sampai ke bawah.

b. Solusi atau upaya perbaikan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

- i. Pendampingan dalam penyusunan logical framework dalam menyusun penjenjangan Kinerja.
- ii. Memasukan komponen pencapaian SAKIP Perangkat Daerah didalam komponen tunjangan kinerja sehingga setiap pegawai memiliki tanggungjawab dalam pencapaian kinerja organisasi.

- iii. Melakukan fasilitasi dalam penyusunan SAKIP Perangkat Daerah.

4. Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)

Indikator Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) baru ditargetkan pada RENSTRA 2024-2026.

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa terdapat 22 dari 37 Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP-nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik), sehingga Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) pada Tahun 2023 adalah 59,46%

Dalam pencapaian Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor – faktor yang mendorong tercapainya kinerja ini adalah sebagai berikut:

- i. Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat BB (Sangat Baik) telah menerapkan manajemen kinerja dalam menyusun serta mengimplementasikan setiap komponen Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Akuntabilitas Organisasi.
- ii. Penerapan pola penjenjangan kinerja dalam menyusun kinerja individu.

b. Faktor Penghambat atau Permasalahan

Faktor – faktor yang menjadi penghambat atau permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

- i. Sebagian besar Perangkat Daerah masih belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan, penerapan reward dan punishment, monitoring dan evaluasi rencana aksi, evaluasi capaian kinerja internal.

- ii. Penyusunan Logical Framework dalam membentuk pohon kinerja atau penjenjangan kinerja masih banyak yang belum membentuk hubungan kasualitas atau sebab akibat dari level atas sampai ke bawah.

c. Solusi atau upaya perbaikan

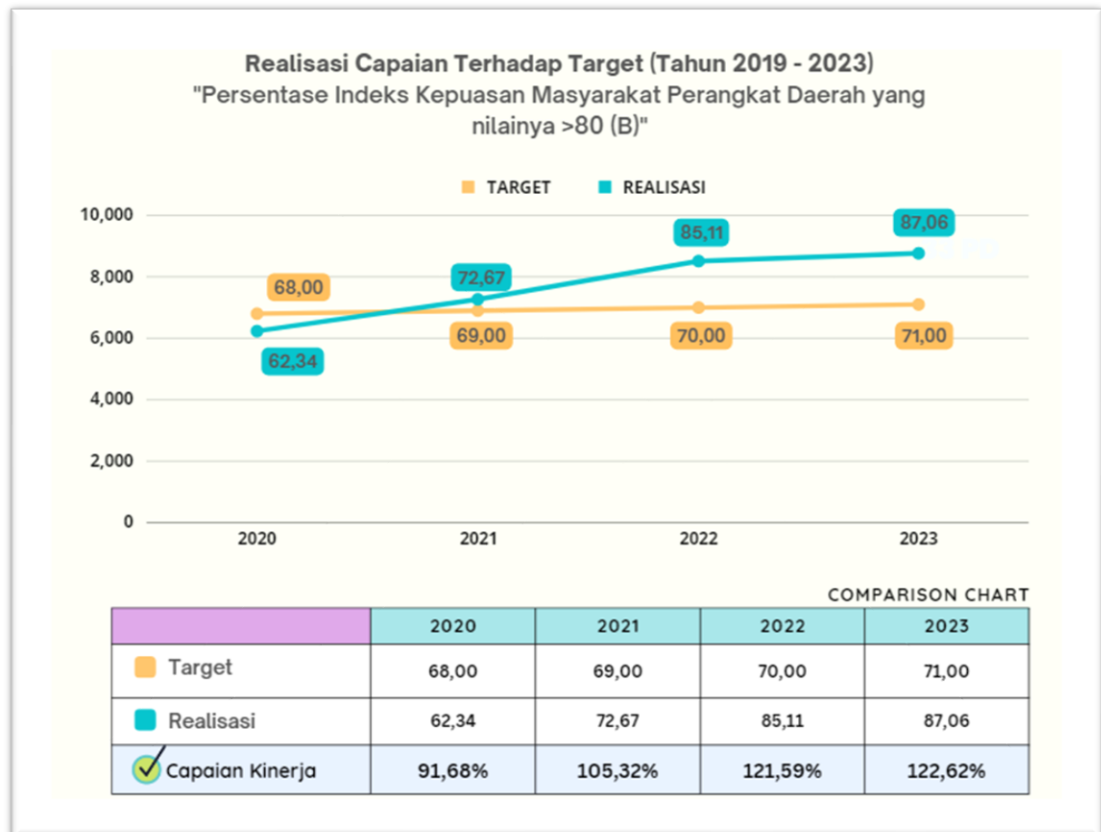
Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

- i. Pendampingan dalam penyusunan logical framework dalam menyusun penjenjangan Kinerja.
- ii. Memasukan komponen pencapaian SAKIP Perangkat Daerah didalam komponen tunjangan kinerja sehingga setiap pegawai memiliki tanggungjawab dalam pencapaian kinerja organisasi.
- iii. Melakukan fasilitasi dalam penyusunan SAKIP Perangkat Daerah.

5. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)

Dari 85 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menyampaikan Survei, ada 74 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang nilai Indeksnya diatas 80,00, Sehingga Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang Nilainya>80 adalah $\frac{74}{85} \times 100\% = 87,06\%$. Gambaran capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 bisa dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2.2
Grafik Realisasi Capaian Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh
Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)



Tabel 2.5
Penyampaian Data SKM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

No	U P P	Jumlah	Penyampaian SKM	persentase (%) yang Menyampaikan	Nilai > 80
1	Perangkat Daerah	37	33	89,19%	84,85%
2	UPTD/Cabdin	80	52	65,00%	73,08%
Jumlah		117	85	72,65%	87,06%

Dalam pencapaian Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor – faktor yang mendorong tercapainya kinerja ini adalah sebagai berikut:

- i. Sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan.
- ii. Sebagian besar Perangkat Daerah telah memiliki Inovasi Pelayanan Publik untuk mendukung layanan yang diselenggarakan.

b. Faktor Penghambat atau Permasalahan

Faktor – faktor yang menjadi penghambat atau permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

- i. Masih ada unit layanan yang belum sesuai ketentuan menyusun standar pelayanan;
- ii. Standar pelayanan yang disusun belum dijalankan secara konsisten;
- iii. Masih ada pelayanan yang diberikan diluar SOP yang telah ditetapkan;
- iv. Inovasi pelayanan yang belum optimal;
- v. Tindak lanjut terhadap hasil pengaduan yang belum optimal;
- vi. Sarana dan prasarana menunjang layanan yang belum optimal.

c. Solusi atau upaya perbaikan

Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

- i. Melakukan fasilitasi/asistensi SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- ii. Evaluasi/reviu SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- iii. Melakukan peningkatan kapasitas Standar Pelayanan (SP);
- iv. Melakukan Fasilitasi / Asistensi Standar Pelayanan (SP).

6. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif

Indikator Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif baru ditargetkan pada RENSTRA 2024-2026.

Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif} = \frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$$

Untuk kondisi awal pada Tahun 2023 berdasarkan Data SIRUP per 31 Desember 2023, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\% = \frac{7.311}{19.781} \times 100\% = \mathbf{36,96\%}$$

7. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Indikator Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan baru ditargetkan pada RENSTRA 2024-2026.

Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan} = \frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total Belanja Operasi dan Modal}} \times 100\%$$

Untuk kondisi awal pada Tahun 2023 berdasarkan Data SIRUP per 31 Desember 2023 dan Pergub Kaltim, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yg melalui pengadaan}}{\text{Total Belanja Operasi dan Modal}} \times 100\% = \frac{7.641.227.174.381}{11.386.931.551.823} \times 100\% = \mathbf{67,11\%}$$

8. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah baru ditargetkan pada RENSTRA 2024-2026.

Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah} \\ &= \frac{\text{Jumlah Nilai PBj yg Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai PBj yg Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBj yg Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun (n-1)}} \times 100\% \end{aligned}$$

Untuk kondisi awal pada Tahun 2023 berdasarkan Komitmen Pemprov Kaltim menggunakan P3DN Tahun 2022 dan Tahun 2023, yaitu:

$$\begin{aligned}
& \frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yg Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai PBJ yg Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yg Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Tahun (n - 1)}} \times 100\% \\
&= \frac{6.948.144.623.298 - 1.966.768.454.572}{1.966.768.454.572} \times 100\% = 253,28\%
\end{aligned}$$

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas sesuai Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) biro yang dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum, pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.1.1 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;

- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Otonomi Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerjasama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.1.2 Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang agama dan kesehatan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar perumusan,

perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;

- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a. Bagian Bina Mental Spiritual;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan biro.

Bagian Bina mental membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.1.3 Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;

- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum, membawahkan :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
- c. Bagian Bantuan Hukum.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

2.3.2 Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- c. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.2.1 Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumberdaya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Perekonomian, membawahi :

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian;
- b. Bagian Sumber Daya Alam; dan
- c. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kebijakan Daerah membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan Badan Layanan Umum Daerah serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas :

- a. penyiapan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.2.2 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.2.3 Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pembangunan, membawahi :

- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.3 Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang, organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- e. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.3.3.1 Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja tatalaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi, membawahi :

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Bagian Tata Laksana.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

2.3.3.2 Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Biro Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tatausaha;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum, membawahi :

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Bagian-bagian sebagaimana di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Bagian Rumah Tangga fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset Sekretariat Daerah, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakandi bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan, dan persuratan dan arsip;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan danstafahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Staf ahli yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha pimpinan dan staf ahli.

2.3.3.3 Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan, membawahi :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;

- b. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Bagian Protokol.

Bagian sebagaimana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tatausaha; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pemantauan dan evaluasi bidang acara, tamu dan hubungan keprotokolan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 142, Bagian Protokol, mempunyai fungsi :

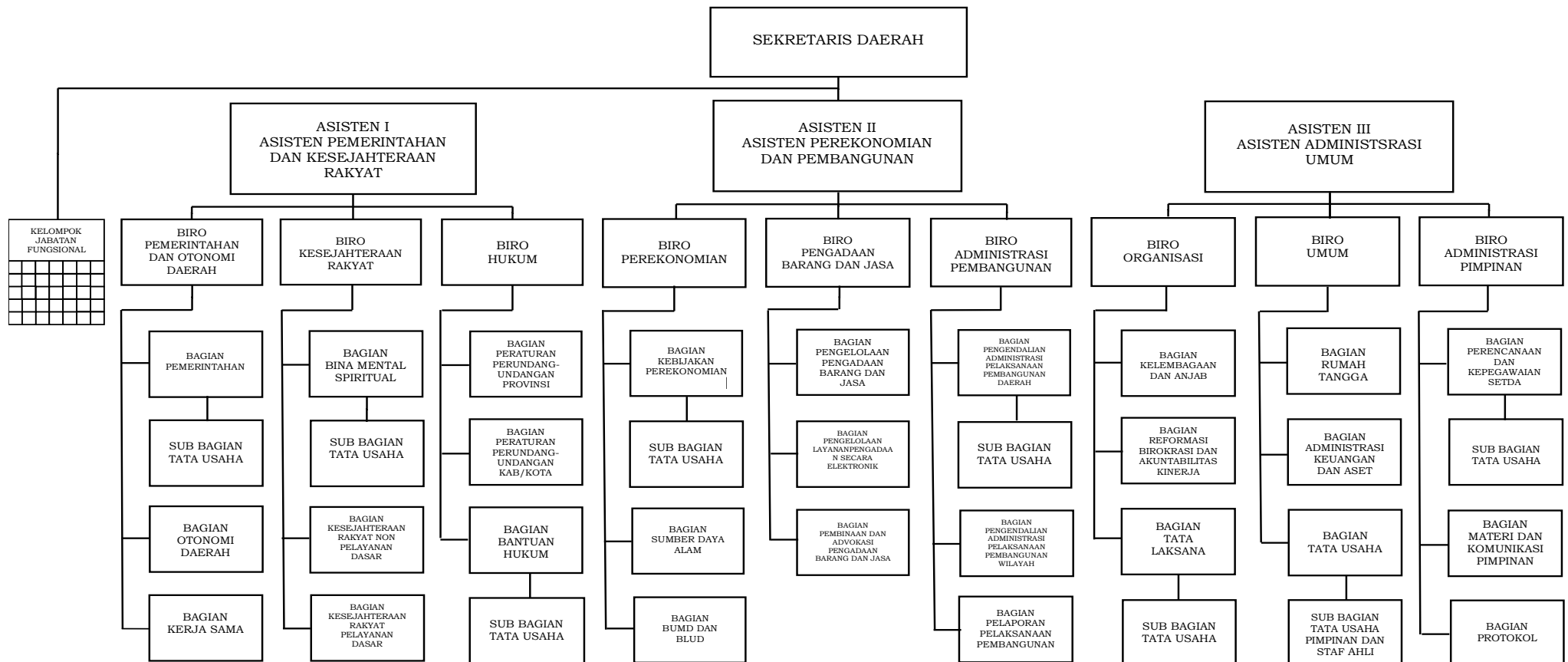
- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) berada di bawah Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Berikut adalah diagram struktur organisasi Sekretariat Daerah rovinsi Kalimantan Timur :

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan sebagai berikut :

1. Isu strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Isu strategis terhadap perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas

3. Isu strategis pelayanan publik yang prima

Belum optimalnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan yang mendukung.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam Ranwal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat

Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Data tersebut sedianya, dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				7.148.430.000	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87	2.434.420.345	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	87	2.434.420.345	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	51.135.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	51.135.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.567.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.567.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.567.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.567.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95%	151.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95%	151.800.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	151.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	151.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	40.000.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	40.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	1.216.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	1.216.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	46.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	46.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi		129.061.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi		129.061.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	129.061.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	129.061.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		796.924.345	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		796.924.345	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	5.091.625	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	5.091.625	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	791.823.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	791.823.720	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah		49.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah		49.500.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik			Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	40.000.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Kaltim	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	2.555.007.780	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Kaltim	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	2.555.007.780	
		Kaltim	2. Persentase LPPD yang di laporkan	100%	600.000.000		Kaltim	2. Persentase LPPD yang di laporkan	100%	600.000.000	
		Kaltim	3. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100%	1.559.001.875		Kaltim	3. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100%	1.559.001.875	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Kaltim	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	1.305.007.780	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Kaltim	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100%	1.305.007.780	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	805.007.780	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	805.007.780	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	500.000.000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	500.000.000	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kaltim	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95%	1.850.000.000	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kaltim	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95%	1.850.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi	3 Dokumen	450.000.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi	3 Dokumen	450.000.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepala Daerah dan DPRD					Kepala Daerah dan DPRD			
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	800.000.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	800.000.000	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	600.000.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	600.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kaltim	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	1.559.001.875	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kaltim	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	1.559.001.875	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Kaltim	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	609.001.875	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Kaltim	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	609.001.875	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Kaltim	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	450.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Kaltim	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	450.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	500.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	3 Laporan	500.000.000	
	BIRO HUKUM					BIRO HUKUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	KALTIM	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	89	1.800.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	KALTIM	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	89	2.147.318.352	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	103.920.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	103.920.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KALTIM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KALTIM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.920.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	7.680.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	7.680.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KALTIM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KALTIM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	72.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	72.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KALTIM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	72.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KALTIM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	72.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	990.995.672	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KALTIM	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	990.995.672	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALTIM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	142.043.110	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KALTIM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	142.043.110	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KALTIM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	22.075.020	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KALTIM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	22.075.020	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KALTIM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	826.877.542	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KALTIM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	826.877.542	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	KALTIM	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	134.693.884	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	KALTIM	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	134.693.884	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALTIM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	134.693.884	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALTIM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	134.693.884	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KALTIM	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	460.762.944	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KALTIM	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	808.081.296	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KALTIM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 lembar	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KALTIM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 lembar	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KALTIM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	453.762.944	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KALTIM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	801.081.296	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KALTIM	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	29.947.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KALTIM	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	29.947.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALTIM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	29.947.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KALTIM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	29.947.500	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	KALTIM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	4.352.178.000	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	KALTIM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	4.352.178.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	KALTIM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.652.178.000	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	KALTIM	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.652.178.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	KALTIM	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80 Dokumen	817.462.280	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	KALTIM	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80 Dokumen	817.462.280	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	KALTIM	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	KALTIM	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	300.000.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	KALTIM	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	800 Dokumen	684.715.720	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	KALTIM	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	800 Dokumen	684.715.720	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	KALTIM	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	400 Dokumen	850.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	KALTIM	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	400 Dokumen	850.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	KALTIM	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	1.700.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	KALTIM	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	1.700.000.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	KALTIM	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Perkara	1.100.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	KALTIM	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Perkara	1.100.000.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	KALTIM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	600.000.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	KALTIM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus	600.000.000	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.629.127.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.704.585.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	94 %	438.266.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	94 %	448.266.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	263.266.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	263.266.000,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	25.000.000,00	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	120.000.000,00	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	120.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	33.600.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	33.600.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	33.600.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	33.600.000,00	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	80.000.000,00	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	90.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	37.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	37.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.222.261.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	1.282.719.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	200.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	225.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	57.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	60.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	965.261.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	997.719.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	100 Bulan	815.000.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	100	820.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	20.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	20.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	780.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	780.000.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	80.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	80.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	40.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	40.000.000,00	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kaltim	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100 %	4.200.000.000,00	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kaltim	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang ditindaklanjuti	100 %	4.350.000.000,00	
		Kaltim	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	1.800.000.000,00		Kaltim	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	1.800.000.000,00	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kaltim	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	Rp 1.800.000.000	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kaltim	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	Rp 1.800.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	250 Unit	1.000.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300 Unit	1.000.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kaltim	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 lembaga	800.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kaltim	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 lembaga	800.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	2.100.000.000,00	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	2.175.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	700.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	725.000.000,00	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	700.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen	725.000.000,00	
	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	700.000.000,00	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	725.000.000,00	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100 %	2.100.000.000,00	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kaltim	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100 %	2.175.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	700.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	725.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	700.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	725.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	700.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	725.000.000,00	
	BIRO PEREKONOMIAN					BIRO PEREKONOMIAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim dan Luar Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Perekonomian	82	2.317.862.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim dan Luar Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Perekonomian	82	2.317.862.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	126.054.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	126.054.000,00	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.054.000,00	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.054.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	71.067.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	71.067.500,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	18.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	18.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	32.667.500,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	32.667.500,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 paket	20.400.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 paket	20.400.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90 %	1.054.054.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	90 %	1.054.054.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	51.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	51.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	30.600.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	30.600.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	18.376.320,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	18.376.320,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	7.911.936,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	96 Dokumen	7.911.936,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	130 Laporan	946.165.744,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	130 Laporan	946.165.744,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	98.796.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	98.796.500,00	
	Pengadaan Mebel	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	36.796.500,00	Pengadaan Mebel	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	36.796.500,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah unit Peralatan/Perlengka	14 Unit	62.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah unit Peralatan/Perlengka	14 Unit	62.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n Kantor yang disediakan					n Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	866.482.620,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	866.482.620,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	860.082.620,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	860.082.620,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	101.407.380,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	101.407.380,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	54.783.180,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	54.783.180,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	18.615.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 unit	18.615.000,00	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	28.009.200,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	28.009.200,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	13.078.561.000,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	13.078.561.000,00	
		Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	95 %	2.189.000.000,00		Kaltim dan Luar Kaltim	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	95 %	2.189.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1.503.969.000,00	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1.503.969.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	1.011.969.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	1.011.969.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	492.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	492.000.000,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	11.574.592.000,00	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	11.574.592.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	10.750.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	10.750.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	390.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	390.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	434.592.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	434.592.000,00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	2.189.000.000,00	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Kaltim dan Luar Kaltim	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	2.189.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.260.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.260.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	408.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	408.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	521.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kaltim dan Luar Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 1 Dokumen	521.000.000,00	
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				15.830.000.000					15.830.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	86	6.310.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	86	6.310.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	260.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	260.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	145.377.520	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	145.377.520	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel	80.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	3.546.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	3.546.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	3.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan	3.500.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %	570.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kaltim	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %	570.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	570.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	570.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.631.105.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.631.105.480	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.359.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.359.800	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.745.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.745.680	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	157.517.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	157.517.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.499.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.499.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	126.018.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	126.018.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kaltim	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %	9.520.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kaltim	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %	9.520.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	1.624.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	1.624.000.000	
		Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	80 %	4.042.000.000		Kaltim	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	80 %	4.042.000.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Wilayah					Pembangunan Wilayah			
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	1.012.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	1.012.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	612.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	612.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	4.042.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	4.042.000.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	3.854.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	3.854.000.000	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	830.000.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	830.000.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.524.000.000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.524.000.000	
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	2.833.969.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	78 Indeks	5.377.562.417	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	88 Persen	134.278.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	88 Persen	173.197.935	
	Penyediaan admnisitrasi pelaksanaan tugas ASN	Kalimantan Timur	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	133.278.000	Penyediaan admnisitrasi pelaksanaan tugas ASN	Kalimantan Timur	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	172.079.100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.118.835	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	60 orang	222.220.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	60 orang	367.823.130	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Persen	71.040.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Persen	81.645.630	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	85.780.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	212.635.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20 orang	65.400.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20 orang	73.542.500	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	83 Persen	785.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	83 Persen	1.016.610.275	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Persen	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Persen	175.242.923	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Persen	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kalimantan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Persen	51.682.694	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Laporan	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Laporan	789.684.659	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	88 Persen	165.345.465	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	88 Persen	1.181.847.186	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	165.345.465	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	1.181.847.186	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	83 Persen	1.466.427.635	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	83 Persen	2.505.955.791	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.222.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.316.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.470.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	341.130.342	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.378.734.535	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	2.153.509.449	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 Persen	60.698.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalimantan Timur	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	83 Persen	132.128.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.499.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	15.603.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	13.499.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	31.206.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	33.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalimantan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	85.318.500	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN	Kalimantan Timur	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	7.463.901.900	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN	Kalimantan Timur	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3	10.340.172.733	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	30 %		PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	35 %		
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	2.275.962.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	3.681.909.460	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	417.852.000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	686.931.800	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	879.570.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.983.506.660	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	978.540.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.011.471.000	
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kalimantan Timur	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	2.633.982.900	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kalimantan Timur	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	3.511.557.373	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.184.267.900	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.479.867.553	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	755.300.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	615.646.520	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	694.415.000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1.416.043.300	
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	2.553.957.000	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	3.146.705.900	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 orang	894.522.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 orang	970.498.800	
	Pembinaan Kelembagaan	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penataan	1 Dokumen	971.875.000	Pembinaan Kelembagaan	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penataan	1 Dokumen	1.354.290.600	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang dan Jasa		Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			Pengadaan Barang dan Jasa		Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	687.560.000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	821.916.500	
	BIRO ORGANISASI					BIRO ORGANISASI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	83 Indeks	2.088.046.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	83 Indeks	2.088.046.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	115.440.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100 %	115.440.200,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12 Dokumen	115.440.200,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12 Dokumen	115.440.200,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10.230.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10.230.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12 Laporan	10.230.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12 Laporan	10.230.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	85.217.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	85.217.500,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2 Paket	60.217.500,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2 Paket	60.217.500,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	3 Orang	25.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	3 Orang	25.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.185.674.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.185.674.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	37.473.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	37.473.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	278.350.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	278.350.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	47.700.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	47.700.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	707.250.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	707.250.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	98.401.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	98.401.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	191.559.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	100 %	191.559.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	15 Unit	191.559.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	15 Unit	191.559.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	419.330.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	419.330.500,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	418.330.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	418.330.500,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	80.594.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	80.594.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	18 Unit	61.812.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	9 Unit	61.812.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	18.782.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.782.000,00	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Indeks Kelembagaan	73 Indeks	1.510.000.000,00	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Indeks Kelembagaan	73 Indeks	1.510.000.000,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	45 Indeks	780.000.000,00			Indeks Kematangan Organisasi	45 Indeks	780.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD	920.000.000,00			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD	920.000.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	60 %	1.220.000.000,00			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	60 %	1.220.000.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	87 %	1.119.761.000,00			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	87 %	1.119.761.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	1.510.000.000,00	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	1.510.000.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100 %	780.000.000,00			Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100 %	780.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2 Dokumen	780.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2 Dokumen	780.000.000,00	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1 Dokumen	730.000.000,00	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1 Dokumen	730.000.000,00	
	Penataan Analisis Jabatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	780.000.000,00	Penataan Analisis Jabatan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	780.000.000,00	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 %	1.119.761.000,00	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90 %	1.119.761.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100 %	2.140.000.000,00			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100 %	2.140.000.000,00	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	920.000.000,00	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	920.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	920.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	920.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	300.000.000,00	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	300.000.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	3 Dokumen	510.000.000,00	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	3 Dokumen	510.000.000,00	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	609.761.000,00	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	609.761.000,00	
	BIRO UMUM					BIRO UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5	204.195.480.980,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5	204.195.480.980	
			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85 %	21.941.044.020,00			Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85 %	21.941.044.020	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	82.536.587.149	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	84.155.431.914	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	380 Orang/Bulan	80.942.238.274,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	390 Orang/Bulan	82.561.083.039,48	Penambahan ASN pada Setda
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.594.348.875,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Jakarta	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.594.348.875,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	1.223.586.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	1.223.586.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	548.100.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	548.100.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan;	Jumlah Laporan Penatausahaan barang	12 Laporan	675.486.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Balikpapan;	Jumlah Laporan Penatausahaan barang	12 Laporan	675.486.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Samarinda	milik daerah pada SKPD				Kota Samarinda	milik daerah pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	3.403.265.040	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	3.468.507.815	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	1.073.079.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	1.073.079.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.398.146.400,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	1.398.146.400,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	135 Orang	932.039.640,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	140 Orang	997.282.414,80	Menunjang IKLK
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indonesia; Luar Negeri	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	31.395.584.193	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indonesia; Luar Negeri	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	1 %	31.452.336.588	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	283.761.975,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	340.514.370,00	Penyesuaian kebutuhan setelah rehabilitasi ruangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	522.339.405,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	522.339.405,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	225 Paket	9.386.108.697,50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	225 Paket	9.386.108.697,50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Paket	769.954.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Paket	769.954.500,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.328.629.050,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.328.629.050,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indonesia; Luar Negeri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1800 Laporan	18.608.567.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indonesia; Luar Negeri	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1800 Laporan	18.608.567.600,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	221.370.240,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	221.370.240,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	274.852.725,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	274.852.725,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	20.884.082.791	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	20.884.082.791	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	15 Unit	6.187.493.500,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	15 Unit	6.187.493.500,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	7.336.500.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	7.336.500.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 Unit	7.360.089.291,45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 Unit	7.360.089.291,45	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	27.159.916.712	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	33.241.490.951	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	87.885.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	87.885.000,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	9.774.001.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	9.774.001.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	2.792.126.820,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	3.071.339.502,00	Penambahan akses internet
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	14.505.903.892,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	20.308.265.448,80	Penambahan outsourcing tenaga keamanan pada Rujab Pimpinan dan aset Biro Umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	23.714.469.597	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	19.321.590.076	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	211 Unit	7.603.532.160,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	211 Unit	7.603.532.160,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit	898.993.200,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit	898.993.200,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	14.968.081.737,25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Balikpapan; Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	10.477.657.216,08	Efisiensi Anggaran telah terlaksananya rehabilitasi ruangan pada Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Balikpapan;	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	325 Unit	243.862.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Balikpapan;	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	325 Unit	341.407.500,00	Penambahan pemeliharaan

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			sarana prasarana
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	13.877.989.498	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	13.982.438.143	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang/Bulan	275.903.085,78	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang/Bulan	275.903.085,78	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	8 Paket	208.897.290,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	8 Paket	313.345.935,00	Mengakomodir pakaian dinas Pimpinan
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	959.175.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	959.175.000,00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12.434.014.122,02	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12.434.014.122,02	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	21.941.044.020	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	24.185.626.385	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	7.910.711.445,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	7.910.711.445,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	6.548.391.360,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	6.548.391.360,00	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	7.481.941.215,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	9.726.523.579,50	Penambahan penyediaan kebutuhan RT Sekretariat Daerah
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100	6.293.092.387	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Administrasi Pimpinan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100	6.293.092.387	
		Biro Administrasi Pimpinan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	436.199.381		Biro Administrasi Pimpinan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	436.199.381	
		Biro Administrasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	8.287.788.232		Biro Administrasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	8.287.788.232	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	1.032.042.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	1.850.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	794.830.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1.100.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	237.212.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	750.000.000	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	303.662.792	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	514.441.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	303.662.792	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	514.441.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	482.507.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	434.507.900	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	172.839.900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	124.839.900	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	1.672.554.287	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	90 %	1.702.754.287	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.295.522.143	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.325.722.143	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90 %	837.776.335	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90 %	621.716.450	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepegawaian, dan Tata Usaha					Kepegawaian, dan Tata Usaha			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	837.776.335	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	621.716.450	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	2.446.961.908	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.909.113.700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.417.472.688	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.879.624.480	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90 %	97.536.550	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan,	90 %	61.406.550	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepegawaian, dan Tata Usaha					Kepegawaian, dan Tata Usaha			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	87.149.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	51.019.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	9.465.327.808	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	9.727.598.013	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	542.783.600	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	558.383.600	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.654.671.893	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.648.067.213	

No.	RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.267.872.315	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.521.147.200	
	Fasilitasi Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	2.349.991.600	Fasilitasi Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	2.349.991.600	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.476.160.800	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.445.160.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	272.950.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	303.950.000	

Sumber: Ranwal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2025 dan data Biro-Biro di Lingkup Setda Prov. Kaltim

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Akan tetapi, pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, usulan tersebut merupakan masukan kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirasa penting dan berasal dari Biro-Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 laporan	Perlunya inventarisasi barang di Biro Administrasi Pimpinan berupa kebutuhan sarana dan prasarana untuk pencatatan di BMD dan Barang Persediaan serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan barang
	Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengelolaan Arsip Dinamis	4 dokumen	1. Perlu dilakukan pengelolaan arsip dinamis dimana proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusunan arsip. 2. Pengelolaan arsip dinamis berupa arsip vital yang merupakan arsip keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat

					diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang (contoh arsip foto, video pada biro adpim). 3. Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. 4. Arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya terus menurun 5. Perlu dianggarkan sarpras arsip foto/Vidio serta ruang khusus penyimpanan
--	--	--	--	--	--

Sumber: data Biro-Biro di Lingkup Setda Prov. Kaltim

Hanya Biro Administrasi Pimpinan yang mengusulkan penambahan Sub Kegiatan yang diharapkan dapat terakomodir pada Tahun 2025. Usulan penambahan Sub Kegiatan sebagaimana surat Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Mei 2024 Nomor: 007.2/17/B.ADPIM/2024 terdapatnya Sub Kegiatan yang belum terakomodir di Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut Biro Adpim mengusulkan penambahan Sub Kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan yang disesuaikan dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Rencana Kerja Tahun 2025.

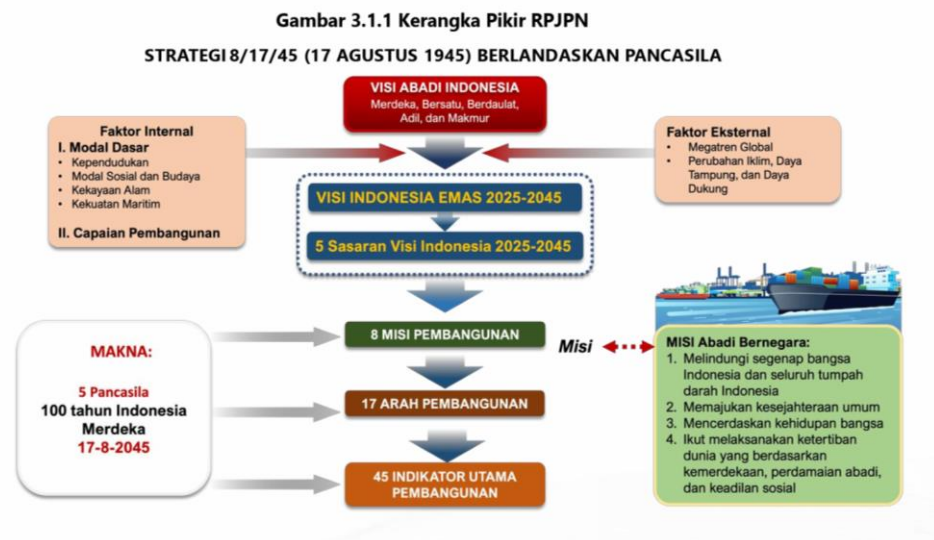
BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional adalah analisa kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045 (Visi Indonesia Emas 2045) (Gambar 3.1.1).



Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya

manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok transformasi.

Transformasi dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan stabilitas nasional yang meliputi supremasi hukum, keamanan nasional, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi untuk situasi dalam negeri yang kondusif, serta diplomasi tangguh untuk memperkuat peran di kancah internasional. Supremasi hukum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sementara Keamanan Nasional yang kuat melindungi negara dan menciptakan lingkungan aman. Demokrasi substansial menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, sedangkan stabilitas ekonomi, yang meliputi fiskal, moneter, dan sektor keuangan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor keuangan yang kuat mendukung akses masyarakat dan usaha kecil menengah terhadap layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Apabila keempat aspek ini stabil, maka negara akan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Fondasi yang kuat perlu dilengkapi dengan diplomasi yang tangguh agar Indonesia mampu bersaing di dunia internasional yang sangat kompetitif. Diplomasi tangguh merupakan diplomasi total yang strategis meliputi diplomasi ekonomi, kedaulatan, kepemimpinan, perlindungan, dan publik. Diplomasi ini dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah dengan modalitas diplomasi yang andal.

Selanjutnya, kesejahteraan pembangunan dalam rangka menjamin masyarakat yang sekaligus berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, mengelola sumber masyarakat daya alam dalam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2 (dua) misi (agenda) yang tercakup dalam kelompok kedua, yaitu landasan transformasi.

Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung dengan sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Nusantara dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, unsur sarana prasarana perlu dipersiapkan secara menyeluruh, baik berupa konektivitas, ketenagalistrikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi, maupun sarana dan prasarana dasar. Selanjutnya, seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan wilayah perlu memperhatikan tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta harus mempertimbangkan karakteristik wilayah sehingga tidak satu ukuran untuk semua (*one size fits all*) dan memberikan pemihakan kepada daerah afirmasi.

Dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan, disiapkan kaidah pelaksanaan yang memastikan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko. Dengan pemangku kepentingan yang beragam, diperlukan komunikasi publik yang tepat. Selanjutnya, dukungan pembiayaan yang memadai dan inovatif. Hal tersebut memungkinkan investasi produktif di

berbagai sektor, antara lain infrastruktur, pendidikan, dan inovasi sebagai motor pertumbuhan. Pembiayaan inovatif mengatasi hambatan ketersediaan sumber dana, sementara investasi, khususnya investasi asing membawa juga teknologi dan pengetahuan. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 (tiga) misi (agenda) dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok kerangka implementasi transformasi.

Delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan tersebut diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dan Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya ke wilayah yang masuk administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dipastikan akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur.

Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan kependudukan merupakan yang paling besar mendapatkan pengaruh. Selain aspek sosial yang melibatkan masyarakat adat lokal yang juga berpotensi menimbulkan munculnya beberapa upaya yang adaptif dan bersifat masif. Jika diurutkan dari besarnya pemberian dampak, maka aspek lingkungan dan kependudukan merupakan dua persoalan teratas. Selanjutnya, secara implementatif kedua aspek ini akan mempengaruhi ekonomi wilayah dengan potensi imbas kepada sektor sosial-budaya lainnya.

Bagian paling menguntungkan dari pemindahan IKN adalah akan adanya penyeimbangan di berbagai sektor dan secara langsung akan mendukung desentralisasi atau otonomi daerah secara menyeluruh.

Pemindahan IKN juga merupakan tantangan yang sangat positif bagi Pemerintah Pusat dan sekaligus Pemerintah Daerah dalam membuat peta dan membentuk desain baru dari seluruh skema pengembangan yang akan

dilaksanakan. Bagi Kalimantan Timur secara khusus, dan pulau Kalimantan secara umum, tantangan yang paling besar adalah upaya merebut seluruh peluang yang telah dimulai melalui upaya-upaya pengarusutamaan pembangunan ekonomi hijau.

Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Nasional yang mengacu pada RPJPN penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan isu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Sebagai daerah asal wilayah IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN, maka pada tahap awal pembangunan IKN yang sedang berlangsung saat ini, Provinsi Kalimantan Timur ini menangkap momentum tersebut dengan slogan pembangunan periode tahun 2024-2026 adalah “MEMBANGUN KALTIM UNTUK NUSANTARA”.

Slogan ini memberi semangat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk membangun daerah dengan memposisikan bahwa Kaltim adalah bagian dari proses pembangunan IKN. Membangun Kaltim untuk Nusantara bermakna bahwa pembangunan tiga tahun kedepan disinergikan dengan pembangunan IKN. Pembangunan IKN akan memberi pengaruh besar bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, demikian juga sebaliknya sehingga dapat terwujud percepatan pembangunan kedua wilayah.

Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur sebagai Daerah Mitra direncanakan menjadi penggerak pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan serta Kawasan Timur Indonesia. Salah satu fokus pembangunan Kalimantan Timur dari aspek penataan ruang yakni mendukung pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua, melalui dukungan pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, yang aman, modern, dan produktif, serta simbol identitas bangsa Indonesia, dan mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Misi ke-5 yang diampu oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik. Misi ini akan diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C)

Tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	UNIT KERJA
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK <i>(Yang dimaksud adalah menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas (koheren, rasional, konsisten) di bidang pembangunan sosial meliputi seluruh aspek kesra, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup melalui birokrasi yang berAKHLAK)</i>	Indeks Kualitas Kebijakan	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	Biro Kesra
			2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	Biro POD
			3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Persen	
			4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi	Persen	
			5	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	Biro Hukum
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	1	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang fasilitasi	Persen	Biro Perekonomian
			2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	
			3	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	Biro PBJ
			4	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	Biro Adbang

		Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	Biro Organisasi
			2	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	Biro Umum dan Biro Adpim
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat	Biro Adpim
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)		2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	

Sumber: RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Sekretariat Daerah melaksanakan 8 (delapan) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 109 (seratus sembilan) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 9) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- j. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- k. Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
- 1) Penyiapan Materi Pimpinan
 - 2) Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - 3) Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

1. Fasilitasi Keprotokolan

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- 2) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

2. **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

- a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

- 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
- 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
- 4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

- b. Fasilitasi Bantuan Hukum

- 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

3. **Program Penataan Organisasi**

- a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- 1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
- 2) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
- 3) Penataan Analisis Jabatan

- b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
- 4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
- 5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

4. **Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

- a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- 2) Fasilitasi Penataan Wilayah

- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - 1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - 3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Daerah antar Pemerintah
 - 2) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

5. Program Kesejahteraan Rakyat

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - 3) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

6. Program Perekonomian dan Pembangunan

- a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
 - 3) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

- a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - 2) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - 3) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

- b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

8. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 1) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						226.136.525.000,00							236.241.090.011,38	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						226.136.525.000,00							236.241.090.011,38	
	-	-						226.136.525.000,00							236.241.090.011,38	
1,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	226.136.525.000,00						-	236.241.090.011,38	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	31.395.584.193,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	32.237.863.401,63	BIRO UMUM
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1800 Laporan	18.608.567.600,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Laporan	18.811.495.980,00	BIRO UMUM
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %			-	3.403.265.040,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	3.573.428.292,00	BIRO UMUM
	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			4 Dokumen	1.398.146.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Dokumen	1.468.053.720,00	BIRO UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan			2 Orang/B ulan	275.903.086,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Orang/Bulan	304.183.152,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket			8 Paket	208.897.290,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	8 Paket	230.309.262,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %			-	3.403.265.040,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	3.573.428.292,00	BIRO UMUM
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket			9 Paket	1.073.079.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	50 Paket	1.126.732.950,00	BIRO UMUM
	-	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 %			-	13.877.989.498,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 %	14.848.159.921,00	BIRO UMUM
	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang			8 Orang	959.175.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	8 Orang	1.057.490.438,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan			2 Orang/ Bulan	12.434.014.122,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Orang/ Bulan	13.256.177.069,00	BIRO UMUM
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 %			-	1.223.586.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 %	1.284.765.300,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	675.486.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 Laporan	709.260.300,00	BIRO UMUM
	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	548.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 Laporan	575.505.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-	100 %			-	21.941.044.020,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 %	24.190.001.032,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket			17 Paket	7.910.711.445,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	17 Paket	8.721.559.368,00	BIRO UMUM
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	82.536.587.149,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	82.716.304.592,75	BIRO UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket			17 Paket	6.548.391.360,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YANG BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	17 Paket	7.219.601.474,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket			28 Paket	7.481.941.215,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	28 Paket	8.248.840.190,00	BIRO UMUM

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			135 Orang	932.039.640,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	20 Orang	978.641.622,00	BIRO UMUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	31.395.584.193,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	32.237.863.401,63	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			6 Paket	283.761.975,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	6 Paket	297.950.073,75	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			6 Paket	522.339.405,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Paket	548.456.375,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	23.714.469.597,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	25.620.202.730,00	BIRO UMUM
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			500 Unit	898.993.200,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	20 Unit	991.140.003,00	BIRO UMUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	31.395.584.193,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	32.237.863.401,63	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket			225 Paket	9.386.108.698,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	25 Paket	9.855.414.132,38	BIRO UMUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	23.714.469.597,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	25.620.202.730,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			211 Unit	7.603.532.160,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	3 Unit	8.382.894.206,00	BIRO UMUM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENTS RA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANG TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANG OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			12 Laporan	1.328.629.050,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	1.395.060.502,50	BIRO UMUM
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	95 % 100 % 95 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %			-	20.884.082.791,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 %	22.864.691.619,00	BIRO UMUM
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit			150 Unit	7.360.089.291,00	Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	150 Unit	8.114.498.444,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	27.159.916.712,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	28.905.673.123,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapora n			12 Laporan	87.885.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	96.893.213,00	BIRO UMUM
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %			-	20.884.082.791,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %	22.864.691.619,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit			15 Unit	7.336.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGEL OLAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	15 Unit	8.253.325.000,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	27.159.916.712,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	28.905.673.123,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15 Unit			15 Unit	6.187.493.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGEL OLAAN KEKAYAA N DAERAH YANG DIPISAHK AN, DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	15 Unit	6.496.868.175,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	27.159.916.712,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 86 %	28.905.673.123,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapora n			12 Laporan	2.792.126.820,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFE R UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Laporan	3.078.319.819,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	31.395.584.193,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	32.237.863.401,63	BIRO UMUM
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokum en			4 Dokume n	274.852.725,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Balikpap an, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	RETRIBU SI DAERAH	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	2 Dokumen	288.595.361,00	BIRO UMUM
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Lapora n 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	27.159.916.712,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	28.905.673.123,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	14.505.903.892,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	15.467.759.041,00	BIRO UMUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	31.395.584.193,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	32.237.863.401,63	BIRO UMUM
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokum en			4 Dokume n	221.370.240,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	RETRIBU SI DAERAH	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	4 Dokumen	232.438.752,00	BIRO UMUM
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						15.017.080.000,00						16.472.452.875,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						15.017.080.000,00							16.472.452.875,00	
	-	-						15.017.080.000,00							16.472.452.875,00	
1,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	15.017.080.000,00						-	16.472.452.875,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.702.754.287,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	1.702.754.287,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			150 Paket	282.099.853,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Paket	282.099.853,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	90 % 100 %			-	1.049.152.500,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	90 % 100 %	1.206.525.375,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Lapora n			4 Laporan	385.212.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	9 Laporan	442.994.375,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	1.909.113.700,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	1.909.113.700,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	29.489.220,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	29.489.220,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	1.879.624.480,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	1.879.624.480,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	61.406.550,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	61.406.550,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			15 Unit	51.019.750,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	51.019.750,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			15 Unit	10.386.800,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	20 Unit	10.386.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRaan MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	95 % 100 % 95 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %			-	621.716.450,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 %	621.716.450,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			20 Unit	621.716.450,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	10 Unit	621.716.450,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.702.754.287,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	1.702.754.287,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			150 Laporan	1.325.722.143,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Laporan	1.325.722.143,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket			50 Paket	82.882.800,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	25 Paket	82.882.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			15 Paket	12.049.491,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Paket	12.049.491,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	90 % 100 %			-	1.049.152.500,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	90 % 100 %	1.206.525.375,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokum en			9 Dokume n	663.940.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	4 Dokumen	763.531.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	514.441.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 95 %	514.441.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokum en			12 Dokume n	514.441.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	514.441.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Fasilitasi Keprotokolan	-	100 persen			-	2.037.389.600,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 persen	2.337.389.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Lapora n			2 Laporan	303.950.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	2 Laporan	353.950.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Lapora n			2 Laporan	600.278.800,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Laporan	650.278.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Lapora n			4 Laporan	1.133.160.800,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Laporan	1.333.160.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	100 persen			-	6.686.598.013,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 persen	7.684.598.013,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i>	12 Lapora n			12 Laporan	3.021.147.200,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Laporan	3.526.147.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	12 Lapora n			12 Laporan	3.107.067.213,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Laporan	3.600.067.213,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	-	Penyiapan Materi Pimpinan														
			<i>Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan</i>	12 Dokum en			12 Dokume n	558.383.600,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Dokumen	558.383.600,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokum en			2 Dokume n	309.668.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	4 Dokumen	309.668.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		BIRO HUKUM						6.122.222.000,00							6.122.222.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.122.222.000,00							6.122.222.000,00	
	-	-						6.122.222.000,00							6.122.222.000,00	
1,	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	-	-			-	4.322.222.000,00						-	4.322.222.000,00	
	4.01.05 .1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	100 %			-	2.626.222.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 %	2.626.222.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05 .1.01.0 001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen			35 Dokumen	828.222.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	90 Dokumen	828.222.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05 .1.01.0 002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	850 Dokumen			750 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	850 Dokumen	300.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05 .1.01.0 003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	750 Dokumen			700 Dokumen	645.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	750 Dokumen	645.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05 .1.01.0 004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus			5 Kasus	600.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Kasus	600.000.000,00	BIRO HUKUM
2,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.800.000.000,00						-	1.800.000.000,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	774.085.104,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	774.085.104,00	BIRO HUKUM
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			45 Laporan	679.820.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Laporan	679.820.000,00	BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			30 Paket	81.448.484,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Paket	81.448.484,00	BIRO HUKUM
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %			-	0,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	0,00	BIRO HUKUM
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	20 Orang	0,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 %			-	7.680.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 %	7.680.000,00	BIRO HUKUM
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lapora n			12 Laporan	7.680.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Laporan	7.680.000,00	BIRO HUKUM
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	103.920.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 95 %	103.920.000,00	BIRO HUKUM
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokum en			12 Dokume n	103.920.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	103.920.000,00	BIRO HUKUM
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	20.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	20.000.000,00	BIRO HUKUM
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			30 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	20 Unit	20.000.000,00	BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	806.081.296,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	806.081.296,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapora n			12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	5.000.000,00	BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	801.081.296,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	801.081.296,00	BIRO HUKUM
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	95 % 100 % 95 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %			-	88.233.600,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %	88.233.600,00	BIRO HUKUM
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			13 Unit	88.233.600,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	10 Unit	88.233.600,00	BIRO HUKUM
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	774.085.104,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	774.085.104,00	BIRO HUKUM
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			0 Paket	12.816.620,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Paket	12.816.620,00	BIRO HUKUM
		BIRO ORGANISASI						7.637.807.000,00							7.788.046.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						7.637.807.000,00							7.788.046.000,00	
	-	-						7.637.807.000,00							7.788.046.000,00	
1,	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	5.549.761.000,00						-	5.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02 .1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	100 % 100 %			-	2.290.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 %	2.350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02 .1.01.0 001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokum en			2 Dokume n	780.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	2 Dokumen	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02 .1.01.0 002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokum en			1 Dokume n	730.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	750.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02 .1.01.0 003	Penataan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokum en			2 Dokume n	780.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Dokumen	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	90,00 % 100 %			-	3.259.761.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	90,00 % 100 %	3.350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokum en			1 Dokume n	920.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Dokumen	950.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokum en			3 Dokume n	920.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Dokumen	950.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Lapora n			1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	300.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokum en			3 Dokume n	510.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Dokumen	530.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02 1.02.0 005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokum en			3 Dokume n	609.761.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Dokumen	620.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.088.046.000,00						-	2.088.046.000,00	
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %			-	85.217.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	85.217.500,00	BIRO ORGANISASI
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			3 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	20 Orang	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.185.674.800,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	1.185.674.800,00	BIRO ORGANISASI
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapora n			1 Laporan	47.700.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	47.700.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	115.440.200,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	115.440.200,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokum en			12 Dokume n	115.440.200,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	115.440.200,00	BIRO ORGANISASI
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.185.674.800,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	1.185.674.800,00	BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	16.500.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Paket	16.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 %			-	10.230.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 %	10.230.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lapora n			12 Laporan	10.230.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Laporan	10.230.000,00	BIRO ORGANISASI

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket			2 Paket	60.217.500,00	Semua Kota/Kab ,Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	50 Paket	60.217.500,00	BIRO ORGANISASI
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.185.674.800,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	1.185.674.800,00	BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	37.473.800,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Paket	37.473.800,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	80.594.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	80.594.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			12 Unit	18.782.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	20 Unit	18.782.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1. Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	419.330.500,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1. Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	419.330.500,00	BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapora n			1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	1.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	418.330.500,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	418.330.500,00	BIRO ORGANISASI
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	80.594.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	80.594.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			9 Unit	61.812.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	61.812.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %			-	191.559.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %	191.559.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			15 Unit	191.559.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	10 Unit	191.559.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.185.674.800,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	1.185.674.800,00	BIRO ORGANISASI
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokum en			2 Dokume n	98.401.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	2 Dokumen	98.401.000,00	BIRO ORGANISASI
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lapora n			1 Laporan	707.250.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	4 Laporan	707.250.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							7.148.430.000,00						13.281.465.130,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen			30 Dokumen	609.001.875,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	30 Dokumen	962.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen			20 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	20 Dokumen	495.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan			3 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Laporan	550.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.434.420.345,00						-	2.768.549.970,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	136.800.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	151.800.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	1 Dokum en			2 Dokume n	136.800.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN TRANSFE R, DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	151.800.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	90 % 100 %			-	03,008.599.3			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	90 % 100 %	58.805 .250,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en			1 Dokume n	43,004.365.7	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	29.402 .625,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokum en			1 Dokume n	60,004.233.5	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	29.402 .625,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	70.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Paket	70.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	46.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Paket	50.960.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Laporan	1.400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			9 Unit	9.500.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	10.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			12 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	20 Unit	50.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						8.522.861.000,00							8.765.717.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.522.861.000,00							8.765.717.000,00	
	-	-						8.522.861.000,00							8.765.717.000,00	
1,	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	6.000.000.000,00						-	6.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04 .1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	100 %			-	1.800.000.000,00			-	-	-	100 %	1.800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.01.0 001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300 Unit			250 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300 Unit	1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.01.0 002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga			10 Lembaga	800.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Lembaga	800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	100 %			-	2.100.000.000,00			-	-	-	100 %	2.175.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.02.0 001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen			12 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	725.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.02.0 002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 Dokumen			12 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	725.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.02.0 003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen			12 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	725.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	100 %			-	2.100.000.000,00			-	-	-	100 %	2.175.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.03.0 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen			12 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	725.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04 .1.03.0 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen			12 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	725.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen			12 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Dokumen	725.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.522.861.000,00						-	2.615.717.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	169.398.000,00			-	-	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	179.398.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			18 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Unit	40.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	324.000.000,00			-	-	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	327.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			12 Dokumen	304.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	306.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n			12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	21.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %			-	37.000.000,00			-	-	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	37.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			4 Orang	37.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Orang	37.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	731.019.044,00			-	-	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	1.141.839.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			6 Paket	124.041.220,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	58.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	59.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			12 Laporan	548.977.824,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	882.839.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Lapora n 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	1.261.443.956,00			-	-	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	930.480.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapora n			12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	12.480.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	12.480.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	1.228.963.956,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	898.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokum en			2 Dokume n	725.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06 .1.01.0 002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokum en			2 Dokume n	345.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06 .1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	100 %			-	11.972.974.384,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06 .1.02.0 001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokum en			6 Dokume n	11.500.610.929,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORSTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	6 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokum en			2 Dokume n	240.163.455,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokum en			2 Dokume n	232.200.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokum en			1 Dokume n	297.000.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokum en			1 Dokume n	362.031.079,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.580.034.857,00						-	0,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.062.272.452,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			50 Paket	70.094.787,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Paket	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %			-	99.961.985,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket			41 Paket	36.457.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	50 Paket	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			3 Orang	58.106.985,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	20 Orang	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen			25 Dokumen	5.397.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	25 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	130.468.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			12 Dokumen	130.468.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	1.021.914.606,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	1.011.667.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	0,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	112.515.700,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			2 Unit	58.141.200,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	3 Unit	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			25 Unit	23.440.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	20 Unit	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 0 Unit			7 Unit	145.767.380,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	10 Unit	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.062.272.452,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			130 Laporan	946.165.744,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Laporan	0,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	1.021.914.606,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	10.247.106,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			-	1.062.272.452,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 85 % 90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	96 Dokum en			96 Dokume n	7.806.300,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	96 Dokumen	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	23.726.121,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Paket	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket			25 Paket	14.479.500,00	Semua Kota/Kab . Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	25 Paket	0,00	BIRO PEREKONOMIAN
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						12.750.000.000,00							12.750.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						12.750.000.000,00							12.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-						12.750.000.000,00							12.750.000.000,00	
1,	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85 %			85 %	6.700.000.000,00						85 %	6.700.000.000,00	
	4.01.08 .1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	90 % 90 %			85 % 85 %	4.500.000.000,00			-	-	-	90 % 90 %	4.500.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08 .1.01.0 001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Lapora n			4 Laporan	600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	4 Laporan	600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08 .1.01.0 002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Lapora n			4 Laporan	600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	4 Laporan	600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08 .1.01.0 003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Lapora n			6 Laporan	3.300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	6 Laporan	3.300.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08 .1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90 %			85 %	2.200.000.000,00			-	-	-	90 %	2.200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08 .1.02.0 001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokum en			1 Dokume n	600.000.000,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08 .1.02.0 002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Lapora n			1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	1.000.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08 .1.02.0 003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokum en			1 Dokume n	600.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan	90 Indeks			83 Indeks	6.050.000.000,00				90 Indeks	6.050.000. 000,00	
			Kesekretariatan	100 Indeks			87 Indeks					100 Indeks		
			Biro Organisasi	Indeks			Indeks					85 Indeks		
			Indeks Kualitas	85			78					100 Indeks		
			Layanan	Indeks			Indeks					90 Indeks		
			Kesekretariatan	100			82					100 Indeks		
			Biro	Indeks			Indeks					84 Indeks		
			Pemerintahan	90			84,5					90 Indeks		
			dan Otonomi	Indeks			Indeks					80 Indeks		
			Daerah	100			100 %					83 Indeks		
			Indeks Kualitas	Indeks			100 %					85 Indeks		
			Layanan	85			100					100 %		
			Kesekretariatan	Indeks			Indeks					100 %		
			Biro Pengadaan	90			86					85 Indeks		
			Barang dan Jasa	Indeks			Indeks					80 Indeks		
			Indeks Kualitas	80			83					83 Indeks		
			Layanan	Indeks			Indeks					100 Indeks		
			Kesekretariatan	83			100					90 Indeks		
			Biro	Indeks			Indeks					84 Indeks		
			Perekonomian	85			88					85 Indeks		
			Indeks Kualitas	Indeks			Indeks					100 %		
			Layanan	100 %			100 %					100 Indeks		
			Kesekretariatan	100 %			100					100 Indeks		
			Biro Umum	85			Indeks					100 %		
			Persentase	Indeks										
			Keluhan	80										
			Pengguna	Indeks										
			Layanan yang	83										
			ditindaklanjuti	Indeks										
			(Biro	100										
			Administrasi	Indeks										
			Pimpinan)	90										
			Persentase	Indeks										
			Keluhan	85										
			Pimpinan yang	Indeks										
			ditindaklanjuti	85										
			(Biro Umum)	Indeks										
			Indeks Kepuasan	100 %										
			Pimpinan	100										
			terhadap	Indeks										
			pelayanan	100										
			Keprotokolan dan	Indeks										
			Materi dan	100 %										
			Komunikasi											
			Pimpinan Indeks											
			Kualitas Layanan											
			Biro Administrasi											
			Pembangunan											
			Indeks Kualitas											
			Layanan											
			Kesekretariatan											
			Biro Administrasi											
			Pembangunan											
			Indeks Kualitas											
			layanan											
			kesekretariatan											
			Biro Administrasi											
			Pimpinan Indeks											
			Kualitas Layanan											
			Kesekretariatan											
			Biro											
			Kesejahteraan											
			Rakyat Indeks											
			Kualitas Layanan											
			Kesekretariatan											
			Biro											

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tata Usaha Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD													
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket			50 Paket	80.000.000,00	Kota Samarin da, Samarin da Ulu, Jawa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	50 Paket	80.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum) Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi) Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan) Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan) Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro Kesejahteraan Rakyat)	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 persen 83 % 83 %			100 % 100 % 25,00 85 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 persen 83 % 83 %	298.939.0			-	-	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	000,00 133.517.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha													
			Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ) Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)													
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			20 Unit	67.363.025,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	20 Unit	20.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokum en			1 Dokume n	260.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra) Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi) Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Biro Kesra Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Biro Perencanaan) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah (Biro Perencanaan) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah (Biro POD) Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah pada Biro Perencanaan Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan, Pelaksanaan Pemantauan dan	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 % 90 persen 60 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 %			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 persen 60 % 100 % 100 % 100 % 60 % 100 %	145.377.520,00			-	-	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	145.377.520,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum) Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ) Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD													
	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			15 Orang	15.377.520,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	20 Orang	15.377.520,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			15 Orang	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	20 Orang	50.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perekonomian) Persentase Pemeliharaan													
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum) Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ) Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)													
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			3 Unit	176.440.000,00	Kota Samarin da, Samarin da Ulu, Jawa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	3 Unit	102.018.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			2 Unit	55.136.000,00	Kota Samarin da, Samarin da Ulu, Jawa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	2 Unit	11.499.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENS TA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang (Biro Ksejahteraan Rakyat) Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Hukum) Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum (Biro PBJ) Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi) Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	12 Bulan 100 % 85 % 1 100 % Lapora n 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			12 Bulan 1 Laporan 83 % 100 % 90 persen 82 % 100 % 12 Bulan 100 % 100 % 83 % 100 % 100 % 100 %	2.083.004.656,00			-	-	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 86 %	1.631.105.480,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapora n			1 Laporan	220.981.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	208.359.800,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapora n			1 Laporan	2.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	2.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE REINST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Presentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)													
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	10 Unit	100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro	100 % 100 % 85 %			12 Bulan 83 %	3.162.678.799,00			-	-	-	100 % 100 % 85 %	3.780.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Kesra) Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan Persentase administrasi umum yang dilaksanakan (Biro PBJ) Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ) Persentase Laporan Pelaksanaan	90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 % 100 %			83 % 83 % 90 % 90 % 100 % 90 % 100 % 90 % 90 persen 92 % 92,00 % 100 % 82 % 100 %						90 % 85 % 86 % 12 Bulan 90 % 95 % 100 %			

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENT RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan) Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Hukum													
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lapora n			4 Laporan	3.064.069.229,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	4 Laporan	3.750.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Paket	10.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	88.609.570,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Paket	20.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						10.503.829.000,00							10.713.905.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						10.503.829.000,00							10.713.905.000,00	
	-	-						10.503.829.000,00							10.713.905.000,00	
1,	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-			-	7.463.901.900,00						-	7.463.901.900,00	
	4.01.07 .1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Variabel			-	2.275.962.000,00			-	-	-	4 Variabel	2.275.962.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07 .1.01.0 001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan			1 Laporan	417.852.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	417.852.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07 .1.01.0 002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan			1 Laporan	879.570.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	879.570.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07 .1.01.0 003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lapora n			1 Laporan	978.540.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	978.540.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	1 variabel			-	2.633.982.900,00			-	-	-	1 variabel	2.633.982.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Lapora n			1 Laporan	1.184.267.900,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	1.184.267.900,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lapora n			1 Laporan	755.300.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	755.300.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lapora n			1 Laporan	694.415.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	694.415.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 Variabel			-	2.553.957.000,00			-	-	-	4 Variabel	2.553.957.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			40 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	4 Laporan	650.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %			-	60.698.000,00			-	-	-	100 % 86 % 100 % 85 % 100 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 %	60.698.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			40 Unit	33.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	20 Unit	33.700.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			2 Unit	13.499.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	3 Unit	13.499.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			1 Unit	13.499.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	2 Unit	13.499.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Lapora n 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	1.466.427.635,00			-	-	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	1.466.427.635,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n			12 Laporan	1.378.734.535,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	1.378.734.535,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %			-	371.303.465,00			-	-	-	95 % 100 % 95 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 90 %	581.379.465,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			40 Unit	371.303.465,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	10 Unit	581.379.465,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %			-	1.466.427.635,00			-	-	-	12 Bulan 100 % 85 % 1 Laporan 90 % 85 % 100 % 100 % 100 % 86 %	1.466.427.635,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	82.470.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	82.470.700,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			12 Laporan	5.222.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Laporan	5.222.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %			-	134.278.000,00			-	-	-	95 % 90 % 100 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %	134.278.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	133.278.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	133.278.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	1 Dokum en			12 Dokume n	1.000.000,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %			-	222.220.000,00			-	-	-	100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 100 %	222.220.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket			1 Paket	71.040.000,00	Kota Samarin da, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	50 Paket	71.040.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		JUMLAH						311.424.177.000,00							312.134.898.016,38	

Sumber: SIPD RI/2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode satu tahun yang sifatnya operasional, yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan komitmen sebagai kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan RENJA Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ketentuan dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2025, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pencapaian sasaran tersebut. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Samarinda, Juli 2024

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 000.7.2 / 0255 /B. Adpim-I

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL,
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Tahun 2024 mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024;
- b. bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Pembahas dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Pembahas dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembahas Dan Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 000.7.2 / ~~08-55~~ /B.Adpm-I tentang PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL, RANCANGAN AKHIR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

TIM PEMBAHAS DAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL, RANCANGAN AKHIR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.

Anggota : 1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
3. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.
4. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur.
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
7. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur.
8. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur
9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur.
10. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :

1. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analisis Perencanaan);
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan);
3. Reynaldi Akhmad, S.STP (Analisis Pelayanan);
4. Igo Febriansyah, S.STP (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan);
5. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan);
6. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan);
7. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



SRI WAHYUNI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.7.2/ 0243 /B. Adpim-I

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dalam rangka proses penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Surat Edaran Pj. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/0136/Bapp-II tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025;
15. Surat Edaran Pj. Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/0136/Bapp-II tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :
Tugas-tugas kepanitiaan sebagai narasumber, moderator, pembawa acara, rohaniwan serta pelaksanaan tugas lainnya dalam rangka kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- KETIGA : Panitia Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,



HJ. SYARIFAH ALAWIYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 000.7.2/ 0243 /B.Adpim-I, TENTANG PANITIA
KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONIL PANITIA KEGIATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

	Narasumber 1
	Narasumber 2
	Moderator
	Pembawa Acara
	Rohaniwan
Anggota	: 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Prov. Kaltim. 2. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analisis Perencanaan). 3. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan). 4. Reynaldi Akhmad, S.STP (Analisis Pelayanan); 5. Igo Febriansyah, S.STP. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan); 6. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan). 7. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan). 8. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim.

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,



HJ. SYARIFAH ALAWIYAH